BAB III

SETTING LOKASI PENELITIAN

A. Profil Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang secara formal didirikan di Surabaya, pada tanggal 16 Rajab 1433 H atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M. Disebut secara formal sebab di kalangan para kiai –yang kelak menjadi basis massa NU– sudah terjalin komunikasi secara informal. Pun kesamaan faham, wawasan keagamaan, cara pengamalan, dan "ritual-ritual" keagamaan yang dijalani.[1]

Di sisi lain, para kiai juga mempunyai ikatan emosional yang kuat sebab pertemuan-pertemuan dalam berbagai acara, seperti selamatan, haul, atau berada dalam ikatan seperguruan. Bahkan tidak jarang pula para kiai yang mempunyai ikatan keluarga (dengan kiai lain) melalui hubungan perkawinan.[2] Sebagai contoh Kiai Hasyim Asy'ari menikahkan putrinya dengan Kiai Baidlowi. Sementara putra Kiai Hasyim (Kiai Kholiq Hasyim) menikah dengan keponakan Kiai Baidlowi.[3]

Jika ditilik lebih lanjut, kelahiran NU tidak bisa dilepaskan dari perdebatan atas corak pemahaman kegamaan yang berkembang di tanah air. Hal ini bisa dilihat pada tahun 1922, ketika diselenggarakan Kongres Umat Islam di Cirebon

---

[1]M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik*…48.
[2]Ibid.
[3]Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta:LP3ES, 1982), 72; Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesinambungan* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Yogyakarta: IMPULSE, 2011), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempertemukan umat Islam baik dari kalangan kaum pembaruan maupun kalangan tradisi.[4]

Forum yang awalnya diharapkan menjadi media pengikat dan wahana persatuan umat Islam untuk melawan penjajah, justru menjadi "arena konflik". Muhammadiyah –organisasi keagamaan yang berdiri tahun 1912– menghendaki bahwa umat Islam idealnya mengembalikan segenap urusan pada al-Qur'an dan Hadits. Kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama sudah seharusnya ditutup.

Muhammadiyyah yang secara karakter keagamaan cenderung melakukan pembaharuan, secara nyata menyudutkan kelompok tradisi. Meskipun kehadiran kelompok tradisi memunculkan penentangan terhadap sendi keagamaan yang dianut, namun kelompok tradisi tidak bersikap anti terhadap kelompok pembaharu. Sementara di internal kelompok pembaharu juga muncul konflik. Sarekat Islam (SI) yang enggan mendebatkan permasalahan keagamaan dihadapkan pada Muhammadiyah dan Persis yang menghendaki kemurnian agama.[5]

Perdebatan antara kaum pembaharu dan tradisi kembali mengemuka tatkala pemilihan utusan ke Kongres Khilafat[6] di Makkah. Kala itu kelompok pembaharu memutuskan sendiri akan mengirimkan utusan, yakni Tjokroaminoto dari SI dan Kiai Mas Mansur dari Muhammadiyah. Terkait dengan hal ini

---

[4]Einar Martahan Sitompul, *NU & Pancasila* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 44-51.

[5]Perbedaan pandangan antara kaum pembaharu dan yang menjaga tradisi memang senantiasa menghiasi perjalanan umat Islam Indonesia. Selain dalam kongres tersebut, "pertentangan" kaum pembaharu dan adat di Minangkabau bisa menjadi contoh lain. Lihat Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam.*…120. Bahkan (sebab) penentangan ini juga menjadi cikal bakal NU (respon penolakan atas kebijakan Raja Saud).

[6]Kongres Khilafat adalah kongres yang bertujuan menetapkan khalifah (pemimpin umat Islam). Sebelumnya Kongres Khilafat juga hendak dihelat oleh pemimpin di Mesir, namun diundur. Akhirnya perhatian tertuju ke Kongres Khilafat Makkah. Lihat Einar Martahan Sitompul, *NU & Pancasila.*… 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditengarai sebelum kongres resmi dihelat pada Pebruari 1926, sudah ada suatu rapat internal antar-organisasi modernis pada Januari 1926 dan memutuskan delegasi dua orang di atas (baca: Tjokroaminoto dan Mas Mansur).[7]

Merespon keputusan kongres yang mendelegasikan Tjokroaminoto dan Kiai Mas Mansur, kaum tradisi yang tidak diikutkan menitipkan usulan agar penguasa baru di Saudi tetap menghormati tradisi keagamaan yang berlaku dan ajaran madzhab yang dianut oleh masyarakat Islam setempat. Namun usulan kaum tradisi ditolak oleh kaum pembaharu.[8]

Sebagai catatan, semenjak tahun 1746 Makkah berada pada kekuasaan koalisi Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Ibnu Saud. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang dengan corak pemikiran yang cukup ekstrim dan menjadi fenomena yang baru sama sekali dalam sejarah Islam. Ketika tahun 1740 Muhammad bin Abdul Wahab terusir dari Uyainah, ia kemudian pergi ke Dir'iyah dan menemukan sekutu baru, Muhammad ibnu Saud. Setelah lima belas tahun koalisi ini berlangsung, sebagian besar Jazirah Arab sudah dikuasai.

Perpaduan antara paham keagamaan ala Muhammad bin Abdul Wahab (kemudian disebut Wahabi) dan kekuatan politik Muhammad ibnu Saud ini melahirkan sebuah kekuatan baru yang saling melengkapi. Kekuatan ini berlanjut hingga Muhammad Ali Pasha, Gubernur Mesir, atas perintah Sultan Utsmani pada sekitar tahun 1811-an melakukan ekspedisi dan berhasil membebaskan *Haramain.* Namun kemenangan Muhammad Ali Pasha ini hanya berlangsung sesaat. Pada tahun 1832 kekuatan Wahabi bangkit dan pada tahun 1925 berhasil menguasai

---

[7]Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama…* 100. Menurut hemat penulis, merasa tidak dilibatkannya kalangan tradisionalis juga hal yang wajar. Sebab tatkala merespon kongres yang diinisiasi Mesir terpilih Surjopranoto (SI), Haji Fakhrudin (Muhammadiyah) dan Kiai Wahab Hasbullah (kalangan tradisionalis –kelak NU–) . Lihat ibid.
[8]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haramain. Kemenangan ini didukung "perjanjian pertemanan dan kerjasama" antara Wahabi-Saudi dengan pihak Inggris.[9]

Kebangkitan Raja Saud yang berpaham Wahabi ini, dalam pandangan kaum tradisi menjadi "ancaman" sebab nasib madzhab dan tradisi keislaman di Indonesia juga dipertaruhkan. Sebagaimana diketahui, pola keagamaan Wahabi sangat mudah mengkafirkan selain golongannya, bahkan secara mudah menghalalkan membunuh, menyembelih dan mencuri harta umat Islam lain.[10] Termasuk pula dalam karakter keagamaan Wahabi adalah pemusnahan situs-situs peradaban Islam dan anti-pluralitas bermadzhab.[11]

Kaum tradisi kemudian bergerak dengan mengundang ulama-ulama di Jawa dan Madura untuk berkumpul di kediaman Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Pertemuan yang dihelat di Surabaya pada 31 Januari 1926[12] tersebut menghasilkan dua keputusan yakni:[13]

> "Pertama, meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus menemui Raja Saud kembali ke tanah air. Kedua,membentuk *jam'iyah* (organisasi) untuk wadah persatuan para ulama dalam tugasnya memimpin umat menuju terciptanya cita-cita *izzul Islam wal Muslimin* (kejayaan Islam dan umat Islam)"

Komite Hijaz adalah sebuah kepanitiaan kecil yang kemudian mendelegasikan dari dua orang yakni Kiai Abdul Wahab Hasbullah (sebagai ketua) dan Syekh Ghonaim al-Mishri ke Hijaz (sekarng Arab Saudi). Sebagai gabungan dari Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan, dan Syubbanul Wathon, tak

---

[9]Abdurrahman Wahid (Ed.), *Ilusi Negara Islam*...67-69.
[10]Syekh Fathi Al Mishri Al Azhari, *Radikalisme Sekte Wahabiyah Mengurai Sejarah dan Pemikiran Wahabiyah*, ter. Asyhari Masduqi (Tangerang Selatan: Pustaka Asy'ari, 2011), 33.
[11]Majalah AULA Tahun XXXVIII April 2016, 13.
[12]Tanggal 31 Januari 1926 masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1433 hijriah. Tanggal hijriah ini kemudian diputuskan sebagai hari lahir NU. Lihat Majalah AULA Tahun XXXVIII April 2016, 10.
[13]Einar Martahan Sitompul, *NU & Pancasila*…50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelak Komite Hijaz ini juga berisi kiai-kiai kharismatik seperti Kiai R Asnawi (Kudus), Kiai Nawawi (Pasuruan), Kiai Nachrowi (Malang), dan Kiai Mas Alwi Abdul Aziz (Surabaya).[14]

Dalam tugasnya Komite Hijaz paling tidak membawa lima hal (permohonan) penting. Pertama, diberlakukannya kebebasan bermadzhab. Kedua, diramaikannya tempat-tempat bersejarah. Ketiga, meminta diumumkan (ke seluruh dunia) terkait tarif haji. Keempat, meminta seluruh hukum yang berlaku di Hijaz agar ditulis sebagai Undang-undang (UU) sehingga tidak terjadi pelanggaran atas UU tersebut. Kelima, momohon balasan terkait dengan apa yang disampaikan delegasi.[15] Komite yang diterima dan langsung mendapat jawaban dari Raja Saud ini menyiratkan pesan akan semangat pergaulan internasional NU dan pesan bahwa kelahiran NU tidak bisa dilepaskan begitu saja dari politik.

Dalam perkembangan sejarahnya, setelah resmi menjadi organisasi dan diakui oleh pemerintahan kolonial melalui *Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama*[16] NU menyelenggarakan serangkaian Muktamar (forum tertinggi dalam tubuh NU).[17] Melalui kegiatan Muktamar ini, NU secara organisatoris lebih berkonsentrasi pada pengembangan organisasi dan peningkatan peran ulama'.

Sebagaimana dituturkan Chalik, dalam catatan Anam pada Muktamar pertama tahun 1926 hadir 96 kiai. Pada Muktamar kedua tahun 1927 hadir 146 kiai dan 242 peserta biasa. Pada tahun 1928 tercatat 260 kiai hadir dalam Muktamar dan sudah terbentuk 35 cabang (kepengurusan di tingkat Kabupaten/

---

[14]Majalah AULA Tahun XXXVIII April 2016, 14.
[15]Tim Revisi POA PWNU Jawa Timur, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur* (Surabaya: PW LTNNU Jatim, 2015), 161-162.
[16]Tim Revisi POA PWNU Jawa Timur, *Pedoman Organisasi…* 153.
[17]Muktamar terakhir dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2015 di Jombang Jawa Timur. Terpilih KH. Ma'ruf Amin sebagai Rais Amm dan KH. Said Aqil Siradj sebagai Ketua Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota). Muktamar berikutnya hadir 1450 peserta dari 63 cabang.[18] Hingga Muktamar-muktamar berikutnya yang semakin mengokohkan eksistensi NU.

Di dalam forum yang dengannya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU sah untuk diubah dan diputuskan, tercantum pula payung hukum bagi Pengurus Wilayah (PW). Ini sebagaimana dijelaskan dalam ART NU Bab IV berikut.[19]

BAB IV
TINGKAT KEPENGURUSAN

Pasal 9

Tingkatan kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari :

a. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara.
b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di wilayahnya.
c. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/ Kota dan berkedudukan di wilayahnya.
d. Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan.
e. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya.
f. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan/desa.
g. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok atau suatu komunitas.

Pasal 10

1. Pembentukan Wilayah Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus esar Nahdlatul Ulama.
2. Pembentukan Wilayah diputuskan oelh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah.
3. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
4. Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
5. Pengurus Wilayah berfungsi sebagai Koordinator Cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan.

---

[18]Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama.…* 99. Pola rekrutmen di dalam tubuh NU juga menarik. Terkadang di pesawat, kereta api, atau bahkan via surat. Lihat Halaqoh, "Kiai Wahid Hasyim dan Rekrutmen Kader" dalam http://www.halaqoh.net/2016/08/kiai-wahid-hasyim-dan-rekrutmen-kader_28.html (Selasa, 20 September 2016, 19.38)
[19]Tim Revisi POA PWNU Jawa Timur, *Pedoman Organisasi.…* 93-94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk dalam hal ini, PWNU Jawa Timur adalah sah keberadaannya.[20] Dalam perjalanan PWNU Jawa Timur, terkhusus pasca-reformasi (kurun waktu 2004-2014)[21] tercatat dinamika internal bahkan hingga "pencopotan" Ketua Tanfidziah. Kepengurusan PWNU Jawa Timur pada tahun 2004 adalah hasil Konferensi Wilayah (Konferwil)[22] PWNU Jawa Timur pada tahun 2002 di Pasuruan untuk masa kepengurusan 2002-2006. Pada Konferwil ini terpilih Kiai Masduqi Mahfud sebagai Rais Syuriah dan Kiai Ali Maschan Moesa sebagai Ketua Tanfidziah.

Kepemimpinan NU Jawa Timur berlanjut melalui Konferwil yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Probolinggo pada Nopember 2007.[23] Pada Konferwil ini terpilih (lagi) Kiai Ali Maschan Moesa sebagai Ketua Tanfidziah dan Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rais Syuriah. Namun hasil Konferwil ini tidak berlangsung lama, sebab gejolak terjadi tatkala Kiai Ali Maschan hendak menjadi calon wakil gubernur Jatim (berpasangan dengan Soenarjo) pada 2008.

Dinamika internal NU Jawa Timur terjadi dan akhirnya melalui Rapat Pleno Gabungan Syuriah dan Tanfidziah Kiai Ali Maschan dinyatakan berhalangan tetap. Kepemimpinan Tanfidziah NU Jawa Timur kemudian

---

[20]Untuk selanjutnya, penyebutan PWNU Jawa Timur dan NU Jawa Timur akan digunakan bergantian.

[21]Kurun waktu ini sengaja dibatasi agar terspesifikasi PWNU Jawa Timur tahun 2004-2014 sebagai lokasi penelitian.

[22]Sebagaimana dijelaskan dalam Bab XIV ART Pasal 42 Konferensi Wilayah adalah media pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). Lihat Tim Revisi POA PWNU Jawa Timur, *Pedoman Organisasi*…108.

[23]Suara Merdeka, "KH. Akhyar-Maschan Pimpin NU Jawa Timur" dalam http://suaramerdeka.com/harian/0711/05/nas15.htm (Selasa, 20 September 2016, 20.01)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada Kiai Hasan Mutawakkil Alallah sebagai penanggung jawab (pj) hingga akhir kepengurusan pada tahun 2012.[24]

Setelah masa kepengurusan berahir pada 2012, NU Jawa Timur kembali menghelat Konferwil untuk kepengurusan 2013-2018. Konferwil yang dilaksanakan di komplek Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo ini akhirnya memilih kembali Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rais Syuriah dan Kiai Hasan Mutawakkil Alallah sebagai Ketua Tanfidziah.[25] Namun setelah Muktamar NU ke 33 di Jombang pada tahun 2015, berkenaan dengan Kiai Miftahul Akhyar yang menjadi Wakil Rais Amm PBNU, akhirnya kursi Rais Syuriah NU Jawa Timur ditempati Kiai Anwar Manshur. Di Jawa Timur sendiri, tercatat 44 kepengrusan di tingkat kabupaten/ kota (PCNU).

Di dalam tubuh NU sendiri, terdapat kepercayaan/ajaran yang menjadi identitas di dalam hubungan dengan politik. Ajaran yang dimaksud yaitu pandangan tentang politik. Begitujuga pandangan NU tentang aktor politik, hubungan kiai dengan politik, khittah NU dan cara berkhidmah kader NU yang terjun ke gelanggang politik praktis.

Dalam pandangan NU, sebagaimana dituturkan Kiai Abdurrahman Navis, politik adalah *siyasah* (cara). Sebuah cara untuk mencapai tujuan dalam rangka menjaga agama dan memelihara kemaslahatan umat. Politik menjadi penting,

---

[24]NU Online, "Ali Maschan "no comment" soal Pj Ketua PWNU Jatim" dalam http://www.nu.or.id/post/read/11990/ali-maschan-quotno-commentquot-soal-pj-ketua-pwnu-jatim (Selasa, 20 September 2016, 20.31)

[25]NU Online, "Kiai Miftah-Mutawakkil Kembali Pimpin NU Jatim" dalam http://www.nu.or.id/post/read/44884/kiai-miftah-mutawakkil-kembali-pimpin-nu-jawa-timur (Selasa, 20 September 2016, 20.21)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab dengannya dapat terlahir kebijakan-kebijakan, dan implementasi dari sebuah konsep dan ajaran.[26]

Sejalan dengan Kiai Navis, Kiai Mutawakkil Alallah juga menuturkan bahwa politik adalah *siyasah.* Ia tidak boleh menjadi tujuan. Politik menjadi wasilah untuk mencapai sesuatu, yang bisa berupa hal yang positif bisa juga berupa hal yang negatif. Kiai Mutawakkil menambahkan:[27]

> "Ketika *siyasah* itu digunakan untuk mencapai sesuatu kebenaran atau sesuatu yang melahirkan kemaslahatan untuk umum, maka itu menjadi perbuatan atau langkah yang positif juga. Dalam konteks agamanya masuk pada *amaliyah hasanah*, bahkan bisa menjadi *sunnah hasanah*. Yakni peninggalan yang baik, bukan hanya melahirkan kemaslahatan tetapi juga membuahkan pahala yang berkelanjutan. Sebaliknya, juga akan menjadi *sunnah sayyi'ah* (peninggalan atau perbuatan yang buruk), yang nantinya juga apabila berakibat buruk secara massal akan berisiko pada pelakunya, mendapatkan sanksi atau dosa yang termasuk dosa yang berkembang.

Berkenaan dengan aktor politik, Kiai Navis melihatnya tergantung model politik NU yang mana yang dimaksud. Kiai Navis menyebut, di lingkungan NU ada dua model politik. Pertama model politik keumatan-kebangsaan, kedua model politik praktis. Tatkala yang dimaksudkan adalah model politik keumatan-kebangsaan, maka bisa jadi tidak perlu politisi tetapi mempunyai pengaruh-pengaruh politik yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan.[28]

Apabila politik praktis, maka aktor politik adalah para politisi yang terjun di partai politik, yang ikut dalam Pemilu. Baik yang duduk di dewan (legislatif), eksekutif. Kiai Navis melanjutkan:[29]

> "...sehingga kader-kader NU dibagi, dalam arti ada yang terjun ke politik kebangsaan-keumatan dan ada juga yang terjun ke politik praktis".

---

[26]Kiai Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2016.
[27]Kiai Mutawakkil Alallah, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2016.
[28]Kiai Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2016.
[29]Kiai Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait hubungan kiai dan politik, Kiai Navis menyebut tergantung situasi (termasuk kekuatan/ kemampuan seorang kiai). Ketika situasi mendukung dan diyakini apabila terjun ke politik akan memperbaiki keadaan bangsa, kepada yang lebih baik, maka hukumnya menjadi wajib. Begitupula sebaliknya, apabila keterlibatannya akan menjadi noda-noda politik, maka menjadi haram.

Hubungan kiai dan politik ini berkelindan dengan pemaknaan khittah NU. Perihal khittah NU ini merupakan hal yang cukup vital dalam kaitan dengan beralihnya NU secara kelembagaan yang terjun ke politik praktis menjadi lepas sama sekali dari politik. Dalam hal ini Kiai Mutawakkil menuturkan:[30]

> "Pengertian Khittah 26 itu bukan khittah 26 yang pasif dalam politik, namun khittah yang produktif. Artinya NU secara kelembagaan tidak boleh terikat dengan salah satu kekuatan politik. Tetapi NU harus melakukan tindakan produktif yang melahirkan kemaslahatan untuk semuanya kepada semua partisipan-partisipan politik".

Bahkan berkenaan dengan kaitan kiai dan kader NU yang terjun ke gelanggang praktis, Kiai Mutawakkil berkomentar:[31]

> "Kalau ada politisi dari kader-kader kita yang mau berjuang melalui dunia politik, kemudian meminta restu, meminta saran, kepada tokoh-tokoh NU itu yang memang seharusnya. Supaya diberikan pencerahan, supaya ada *controlling system* didalam menjalankan profesinya, didalam menjalankan langkah-langkah politiknya. Bisa dikatakan politik putih-lah, bukan politik hitam. Ketika kampanye, kampanye sehat-lah, sebab jual program bukan *black campaign*. Jadi yang dimaksud dengan politik dalam konteks khittah 26 bukan NU ditengah-tengah diam, pasif, tapi produktif mendekati semua untuk kepentingan umat".

Kalimat terakhir, berkenaan dengan khittah NU, tak jauh berbeda, juga ditemukan dalam karya Halim berjudul *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama*.[32] Di dalam karya Halim tersebut, dipaparkan pemaknaan khittah 26 menurut Kiai Ali Maschan. Kiai Ali Maschan menyebut bahwa berdasar khittah 26, NU harus berpartisipasi aktif dalam menyukseskan hajatan politik. Sebab pada dasarnya

---

[30]Kiai Mutawakkil Alallah, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2016.
[31]Kiai Mutawakkil Alallah, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2016 .
[32]Abdul Halim, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama* (Jakarta:LP3ES, 2014), 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khittah 26 tidak anti politik, tetapi justru mengamanatkan warga untuk berpolitik, dengan beberapa syarat. Adapaun syarat-syarat tersebut sebagai berikut.

Pertama, tidak menjadikan agama sebagai alat politik dan tidak memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Kedua, makna politik bagi NU adalah peningkatan kualitas politisi. Bahwa jika ada warga NU yang berkesempatan menjadi pejabat baik di legislatif, eksekutif atau di tempat yang lain, harus memposisikan diri sebagai negarawan. Bukan pekerja politik. Ketiga, politik bagi NU adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di berbagai aspek kehidupannya. Di antaranya terjamin sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Sementara bagi kader NU yang terjun ke gelanggang politik praktis, dalam pandangan Kiai Navis, dapat berkhidmah di NU dengan cara bagaimana peluang-peluang politik dapat disinergikan dengan program-program NU. Kiai Navis menambahkan:[33]

> "Umpama ada lowongan di Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya, informasikanlah ke NU. Siapa kiranya kader yang kita dukung. Sehingga semua dapat terisi oleh kader-kader NU. Jadi NU punya *channel* di sana. Ketika ada apa-apa, bisa langsung kontak ke yang bersangkutan.

Sementara Kiai Mutawakkil menyebut, kader NU jangan sampai menjadi kacang lupa kulitnya. Jadi ketika seorang kader mendapat posisi baik, maka kader tersebut harus membatu perjuangan NU. Selain pula, perlunya ditanamkan dalam diri kader untuk senantiasa menjaga karakter yang diajarkan kiai-kiai sepuh. Terutama apa yang dirumuskan oleh Kiai Mahfud Shiddiq sebagai *Mabadi'*

[33]Kiai Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khoiro Ummah (Amanah, Adil, *Ta'awun* (tolong menolong) dan *Istiqomah* (konsisten)).[34]

B. Peta Sosial Keagamaan Provinsi Jawa Timur

Secara geografis, Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah sebesar 47.963 km2 yang meliputi dua bagian utama. Pertama, Jawa Timur daratan dan kedua, Kepulauan Madura. Luas wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 km2, sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11.30 persen atau sebesar 5.422 km2. Di Provinsi Jawa Timur ada dua pulau yang terpisah. Pulau tersebut adalah Madura (melingkupi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamenkasan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Sampang) dan Pulau Bawean yang masuk dalam pemerintahan Kabupaten Gresik.

Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 37.476.757 jiwa dan terdapat 29 kabupaten dan 9 kota. Di antaranya Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Malang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Bangkalan. Dari sekian kabupaten dan kota tersebut, suku Jawa menjadi suku mayoritas dari provinsi dengan ibu kota provinsi Kota Surabaya ini.[35]

Di lihat dari sisi keagamaan, Islam menjadi agama mayoritas di Jawa Timur. Sebagaimana data yang dilansir Kementerian Agama Tahun 2013 pemeluk

---

[34]Kiai Mutawakkil Alallah, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2016

[35]Website Pemerintah Provinsi Jawa Timur, "Sekilas Jawa Timur" dalam http://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/sekilas-jawa-timur (Senin, 20 November 2016, 19.08). Jumlah penduduk Jawa Timur ini menjadi jumlah penduduk terbesar di Jawa. Selain pula, Jawa Timur adalah wilayah di Pulau Jawa yang paling dinamis dan heterogen dari perpektif sosial, budaya dan politik. Lihat Hilmy, *Islam Politik dan...* 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam di Jawa Timur mencapai 39.657.788 orang. Diikuti pemeluk agama Kristen dengan 1.061.400 orang, Katolik dengan 490.735 orang, Hindu dengan 343.551 orang, Budha dengan 205.701 orang dan Konghucu dengan 10.600 orang.[36]

Sementara kelompok keagamaan mayoritas di Jawa Timur adalah NU. Hal ini berpijak pada data yang dilansir PW Ikatan Sarjana NU (ISNU) Jawa Timur pada tahun 2013 yang menyebut bahwa jumlah nahdliyyin di Jawa Timur mencapai 60 persen dari total warga Jawa Timur. Apabila diangkakan, massa nahdliyyin menembus angka sekitar 24.487.914 orang.[37]

Apabila jumlah pesantren menandakan tingginya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan yang diasuh kiai ini, maka jumlah pesantren yang ada di Jawa Timur bisa menjadi indikator betapa peran kiai dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur. Data yang dihimpun Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pesantren di Jawa Timur cukup besar.

Tercatat pada tahun 2008/2009 ada sekitar 2.402 pesantren di Jawa Timur.[38] Angka ini tentu akan terus bertambah mengingat data yang dilansir ini tidak mewakili semua kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Di antara kota yang tidak tercantum adalah Kabupaten Sidoarjo, Banyuwangi, Bondowoso,

---

[36]Kementerian Agama Jawa Timur, "Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2013 Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur" https://jatim.kemenag.go.id/files/jatim/file/file/data/wlex1395925556.pdf (Kamis, 17 November 2016, 20.01)

[37]NU Online, "Nahdliyyin Jatim Inginkan Gubernur NU" dalam http://www.nu.or.id/post/read/43062/nahdliyin-jatim-inginkan-gubernur-nu (Kamis, 17 November 2016, 20.32)

[38]Kementerian Agama, "Daftar Jumlah Santri dan Nama Kyai Tahun 2008/2009" dalam http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/santri-kyai-pontren-35b.pdf (Kamis, 17 November 2016, 20.49)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Situbondo, Jember, Tulungagung, Ponorogo dan Trenggalek. Di sisi lain, apabila adagium "NU adalah pesantren besar, sementara pesantren adalah NU kecil" benar,[39] maka hadirnya pesantren-pesantren ini dapat dibaca sebagai persemaian kekuatan NU.[40]

C. NU Jawa Timur dan Konstelasi Politik

Sebagai kelompok keagamaan mayoritas, NU Jawa Timur menempati posisi penting dalam konstelasi politik. Posisi NU-pesantren-kiai menjadi poros yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam panggung perpolitikan. Meski Muktamar NU ke-27 tahun 1984 memutuskan bahwa NU tidak lagi terikat secara institusi dengan kekuatan politik manapun, nyatanya di lapangan NU masih memperlihatkan relasi dengan politik yang dibangun melalui instrumen lain non-institusi maupun secara institusi.

Instrumen lain non-institusi itu bisa terwujud melalui kiai struktural NU. Menurut penuturan Halim, dalam komunitas NU, kiai menempati kedudukan yang sangat mulia sebab dianggap sebagai pewaris nabi. Posisi kiai ini menjadi tali pengikat emosional-religius dengan masyarakat, terutama di daerah di mana pesantren NU berkembang.[41] Dalam perkembangannya, pesantren-kiai tidak hanya berurusan dengan sosial-keagamaan, tetapi juga berurusan dengan politik seiring kran kebebasan politik yang terbuka. Kiai tidak lagi menjadi makelar budaya, tetapi juga menjadi makelar politik, bahkan aktor politik.

---

[39]Dalam hal ini penulis tidak menutup mata, bahwa di tingkat akar rumput ada perbedaan karakter pesantren di Jawa Timur. Sebut saja, perbedaan Pesantren Langitan Tuban yang menjaga tradisi salaf dan Pesantren Gontor Ponorogo yang disebut sebagai pondok modern. Namun lazimnya, pesantren mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari NU.

[40]Berkenaan dengan ini, untuk "menjaga" pesantren, NU juga mempunyai lembaga khusus yang bidang garapannya adalah pesantren. Lembaga tersebut adalah *Rabithah Ma'ahid Islamy* (RMI). Lihat http://rmi-nu.or.id/ (website resmi RMI).

[41]Abdul Halim, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama*, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halim menuturkan, pergeseran ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kiai memosisikan diri secara fungsional sesuai dengan dinamika sosio-kultural masyarakat. Kedua, berkelindan dengan pemaknaan *Ahlussunnah wal jamaah* (sebagai basis teologis NU). Dua hal ini pada gilirannya membawa kiai pada dua kondisi, yakni memperluas cakupan dakwah, sementara di sisi lain menurunkan dan mengurangi kharisma kiai sebab terjebak dalam intrik politik dan kepentingan yang bersifat pragmatis.[42]

Lebih jauh Warid menyebut adanya pergeseran pola politik kiai NU dari politik kebangsaan ke politik kekuasaan. Pergeseran ini berkelindan dengan masalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan posisi di pemerintahan. Hal ini di antaranya berdampak pada polarisasi politik atau kepentingan politik yang menyebabkan perseteruan yang terjadi antar kiai dan pesantren.[43]

Potret kiai-pesantren yang demikian menemui kesesuaiannya di Jawa Timur. Penelitian Chalik berjudul *Elite Lokal Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur* menunjukkan keterlibatan para kiai, yang tidak hanya menjadi tim pemenangan bahkan menjadi aktor yang turut berkontestasi. Nama-nama itu antara lain Kiai Fathul Huda pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Tuban, Kiai Moch. Qosim pada pilkada Gresik, Kiai Syaifuddin pada pilkada Sidoarjo, Kiai Muqiet Arief pada pilkada Jember dan Kiai Busyro Karim di Sumenep.[44]

Sementara jajaran kiai sebagai tim pemenangan di antaranya terlihat dalam upaya pemenangan pasangan Sambari-Qosim pada pilkada Gresik dan pasangan

---

[42]Ibid., 325.
[43]Achmad Warid, *Fiqih Politik NU: Studi Pergeseran...* 226-227.
[44]Abdul Chalik, *Elite Lokal Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur* dalam Jurnal Karsa Vol. 23 No. 02 Desember 2015, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dadang-Yoyok Mulyadi[45] pada pilkada Situbondo. Di antara jajaran kiai yang berada pada barisan pemenangan Sambari-Qosim adalah Kiai Nur Muhammad, Kiai Syaiful Munir, Kiai A. Rofiq, Kiai Chusnan Ali, Kiai Ali Fikri dan Kiai Ilman. Pada barisan pemenangan Dadang-Yoyok ada Kiai Imam Buchori, Kiai Faqih, Kiai Syaiful Islam, Kiai Ali Makki dan Habib al-Kaff.[46]

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dituturkan Chalik, Sari juga menemukan adanya dukungan kiai dalam kontestasi pilkada. Tepatnya kiai dari pesantren poros NU, yakni Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang dalam Pilkada Jawa Timur tahun 2013. Hasil penelitiannya menenunjukkan berperannya Kiai Imam Kharomain selaku tokoh yang disepuhkan di kalangan Pesantren Mambaul Ma'arif dalam mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Sari menyebut mobilisasi Kiai Imam Kharomain cukup berhasil dengan hasil hampir di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekitar Pesantren Mambaul Ma'arif dimenangkan oleh pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf. Tercatat beberapa TPS memang dimenangkan oleh pasangan Khofifah-Herman, namun hanya terpaut sedikit dengan suara yang diperoleh pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf.[47]

Belum lagi peran kiai NU Jawa Timur menjelang pilpres 2004 yang mengusahakan Gus Dur menjadi calon presiden.[48] Di antara kiai itu adalah Kiai Abdullah Faqih (Tuban), Kiai Shofyan (Situbondo), Kiai Kholil As'ad Syamsul

---

[45]Dua pasangan calon ini (baca: Sambari-Qosim dan Dadang-Yoyok Mulyadi) sama-sama diusung oleh PKB.

[46]Abdul Chalik, *Elite Lokal Berbasis Pesantren...378.*

[47]Hendro Fadli Sari, *Perilaku Politik Elit dan Hubungan Kyai-Santri Dukungan Politik Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang terhadap Pilgub Jatim 2013* dalam http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmfaa672299efull.pdf (Kamis, 17 November 2016, 21.07)

[48]Walau akhirnya Gus Dur dinyatakan tidak lolos sebagai calon presiden yang berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim karena alasan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arifin (Situbondo), Kiai Sholeh Qosim (Sidoarjo) dan Kiai Bashir (Madura).[49] Begitujuga kiai-kiai yang terkumpul dalam "Poros Langitan" dan "Poros Lirboyo" pasca-resmi ditetapkannya pasangan calon yang lolos sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2004.

Posisi kiai-pesantren-santri ini ditegaskan oleh Jati bahwa geopolitik pesantren di Jawa Timur lebih bernuansa politis dibandingkan dengan geopolitik pesantren di Jawa Tengah yang bernuansa kulturalis. Jati menyebut, ada tiga alasan yang melatarbelakangi kondisi ini.[50] Pertama nahdliyyin Jawa Timur memiliki fanatisme dan loyalitas yang begitu kuat kepada NU karena secara sosio-kultural patrimonalisme ulama begitu menguat, seperti di daerah tapal kuda, daerah arek, maupun daerah Madura.

Kedua, Jawa Timur bisa dikatakan sebagai ladangnya semua gejolak politik dalam tubuh NU dan PKB, bermula dan berakhir, sehingga warga NU sangat sadar akan politik. Ketiga, masih kuatnya patrimonalisme ulama dalam sebagian besar wilayah Jawa Timur, di mana figur ulama sebagai pewaris nabi harus dimuliakan dan dihormati segala tindakan dan perilakunya.

Berkenaan dengan ketaatan masyarakat Jawa Timur terhadap kiai ini, sejalan dengan paparan Ahmad Baso bahwa penduduk Jawa dikenal sangat taat dan hormat kepada yang dituakan. Ini sebagaimana dipaparkan Baso sembari mengutip tulisan mantan Wedana yang dimuat di *De Locomotief.* Mantan Wedana ini menuturkan bahwa inti dari asas perilaku bagi penduduk Jawa adalah bahwa kewajiban yang utama yakni memberi hormat kepada orang tua, guru,

---

[49]Munawar Fuad Noeh, *Kyai di Panggung Pemilu.. 115.*

[50]Wasisto Raharjo Jati, *Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama*, https://www.researchgate.net/publication/284642148 (Kamis, 17 November 2016, 21.32)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mertua, dan raja (pemimpin). Bahkan Wedana ini juga menyebut tanpa rasa hormat semenjak kecil, ia yakin tidak akan mencapai kedudukan saat ini (pejabat).[51]

Begitu juga apa yang disampaikan Noeh dan Ma'ali terkait ketaatan masyarakat Madura. Noeh menuturkan, Madura yang acapkali disebut sebagai Serambi Madinah ini, menandakan kuatnya masyarakat Madura dalam mengidentifikasi diri sebagai pemeluk agama Islam. Beriringan dengan itu masyarakat Madura juga dikenal dengan ketaatannya kepada kiai.[52] Sementara Ma'ali menuturkan masyarakat Madura acapkali melabuhkan pilihan politiknya sesuai dengan apa yang dititahkan oleh kiai atau tokoh masyarakat setempat. Saran atau perintah dari orang tua atau kiai juga lebih dipatuhi oleh masyarakat Madura.[53]

Instrumen non-institusi ini, dalam beberapa kesempatan juga menyeret institusi ke dalam pusaran politik. Ini terlihat dari penjelasan Noeh di mana pertemuan yang berujung pada dukungan Kiai Hasyim Muzadi mendampingi Megawati dalam pilpres 2004 dilangsungkan di kantor PWNU Jawa Timur. Pun surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur atas calon DPD tahun 2014 juga menunjukkan relasi ini.

Di sisi lain, posisi NU Jawa Timur tidak hanya muncul menjelang kontestasi pilkada atau pilpres. NU Jawa Timur juga mempunyai peran dalam

---

[51]Ahmad Baso, *Islam Pasca-kolonial* (Bandung:Mizan, 2005), 124.
[52]Munawar Fuad Noeh, *Kyai di Panggung Pemilu.. 57.*
[53]Mastrin, *Hubungan Kohesivitas antara Kiai dan Umat pada Masyarakat Tradisional*, Laporan Penelitian YIIS dan The Toyota Foundation, 1995; Hasan Ma'ali, *Strategi Komunikasi Politik Kiai dalam Suksesi Pilpres 2014 (Studi di Desa Gadu Barat Kecamatan ganding Kabupaten Sumenep Madura)* Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan humaniora, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perumusan kebijakan. Sebagaimana dituturkan Kiai Abdurrahman Navis, bahwa NU Jawa Timur termasuk organisasi kemasyarakatan yang mendorong lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012.[54] Pergub yang dimaksud adalah tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur.[55] Atau juga Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Beralkohol yang diperjuangkan oleh Pengurus Cabang NU (PCNU) Surabaya juga tidak lepas dari dorongan PWNU Jawa Timur.[56]

Sekali lagi, adanya khittah yang mengikat NU secara organisatoris untuk tidak terlibat perpolitikan praktis, tidak menutup pintu bagi turut andilnya para tokoh NU. Seiring dengan "dibukannya" kran kebebasan politik, akses politik terbuka bagi siapa saja, termasuk dari kalangan tokoh-tokoh agama.

[54]Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2016.
[55]Pemerintah Provinsi Jawa Timur, "Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012", http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=633 (Selasa, 20 September 2016, 21.03)
[56]Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id